

## Bab 2

# GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

### A. Kondisi Umum Wilayah Provinsi Jawa Timur

#### 1. Administrasi Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Jawa Timur sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, telah memiliki arah dan tujuan pembangunan termasuk di bidang pendidikan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten/kota maupun Provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keserasian dan keterkaitan dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, 655 kecamatan terbagi ke dalam 8.464 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya 46.428,57 km<sup>2</sup>.

#### 2. Demografi

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara optimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Jumlah penduduk di Propinsi Jawa Timur tahun 2008 adalah 37.892.534 orang. Dari jumlah tersebut, 3.585.185 berusia 7-12 tahun (9,4%) dan 1.776.005 berusia 13-15 tahun (4,6%) serta 1.809.312 berusia 16-18 tahun (4,7%). Berdasarkan data tahun 2007/2008 jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur ini bertambah 0,97 persen per tahun dengan angka kelahiran sebesar 0,99 persen dan angka kematian 0,25 persen. Angka migrasi ke luar diperkirakan sebesar 0,57 persen per tahun dan migrasi ke dalam sebesar 1,49 persen per tahun.

Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur 798 per km<sup>2</sup>, dengan Kota Surabaya sebagai kota terpadat (8.776 orang/km<sup>2</sup>) dan Kabupaten Banyuwangi terjarang (249 orang/km<sup>2</sup>). Data keadaan demografi tahun 2008 seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Keadaan Demografi Tahun 2008

No	Komponen	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	37.892.534
2	Penduduk Usia 7-12 th	1.776.005
3	Penduduk Usia 13-15 th	3.585.185
4	Penduduk Usia 16-18 th	1.809.312
5	Tingkat Pendidikan Penduduk	
	a. Tidak/belum pernah sekolah	3.709.172
	b. Tidak/ belum tamat SD	6.083.862
	c. Tamat SD	9.948.212
	d. Tamat SLTP	5.362.402
	e. Tamat SMA	3.421.345
	f. Tamat SMK	1.578.864
	g. Tamat Akademi Diploma I/II/ III	430.821
	h. Sarjana	1.004.631
6	Tingkat kepandaian membaca	
	a. Dapat membaca menulis	27.963.792
	b. Buta huruf	3.575.517
7	Angkatan Kerja	
	a. Bekerja	18.751.421
	b. Mencari Pekerjaan	1.366.503
8.	Bukan Angkatan Kerja	
	a. Bersekolah	2.104.428
	b. Mengurus Rumah Tangga	5.388.567
	c. lainnya	1.549.416
9.	Penduduk miskin	
	a. Kota	251.350
	b. Desa	7.137.699

Sumber : Buku IIB Data dan Verifikasi

Tingkat pendidikan penduduk dirinci menjadi 7 kategori, dapat digambarkan sebagai berikut: (a) tidak/belum pernah sekolah 3.709.172 orang (12 %); (b) tidak/belum tamat SD 6.083.862 orang (20%); (c) tamat SD 9.948.212 orang (26,9%); (d) tamat SLTP 5.362.402 orang (17%); (e) tamat SMA 3.421.345 orang (11.%); (f) tamat SMK 1.578.864 orang (5%); (g) tamat akademi 1.435.452 orang (5%) termasuk sarjana dan pasca sarjana. Jika ditinjau dari tingkat kepandaian membaca: (a) dapat membaca dan menulis 27.963.792 orang, sedangkan (b) masih buta huruf 3.575.517 orang.

Jumlah angkatan kerja pada dapat diuraikan: (a) jumlah penduduk yang bekerja 18.751.421 orang (50%); dan (b) jumlah penduduk yang mencari pekerjaan 1.366.503 orang (7%), sehingga jumlah angkatan kerja 20.117.924 orang. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas: a) jumlah penduduk bersekolah 2.104.428 orang (24%); (b) jumlah penduduk mengurus rumah tangga 5.388.567 orang (60%); dan (c) lain-lain 1.549.416 orang (17%), sehingga jumlah penduduk bukan angkatan kerja 9.092.411 orang. Penduduk miskin di kota 251.350 orang dan penduduk miskin di desa 7.137.699 orang.

### 3. Geografi

Wilayah Propinsi Jawa Timur, di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Timur dilalui sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo, Kali Lamong, Sungai Brantas dengan anak sungai Kalimas dan Sungai Porong, Sungai Welang, Sungai Kramat, Kali Wonolangan yang semuanya bermuara di Laut Jawa dan Selat Madura.

Faktor geografi mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersedianya SDA merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan antara lain keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.

Keadaan topografi di wilayah Propinsi Jawa Timur perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan: (a) rencana penentuan lokasi sekolah; (b) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; (c) rencana supervisi sekolah dan pengendalian; (d) rencana penempatan guru; (e) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku serta peralatan pendidikan lainnya.

Sumber daya alam baik yang terkandung di daratan, di sungai, maupun di laut merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal itu berarti bahwa pengelolaan SDA secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Di Provinsi Jawa Timur, terdapat berbagai sumber daya alam, yang menjadi andalan, di antaranya adalah: (a) Pertanian/perkebunan, (b) Peternakan/perikanan, (c) Kelautan, (d) Kehutanan, dan (e) Pertambangan

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Provinsi Jawa Timur yang berwawasan ramah lingkungan harus dijadikan pedoman dalam perencanaan terpadu pembangunan, agar tatanan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna serta berhasil guna secara berkelanjutan.

Berhubungan dengan rencana umum tata ruang tersebut perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: (a) kawasan pemukiman 6.095,25 Km<sup>2</sup>/Ha; (b) hutan lindung 12.619,07 km<sup>2</sup>/Ha; (c) kawasan wisata; (d) kawasan industri; dan (e) pertambangan.

Faktor iklim mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan, akan berpengaruh terhadap lingkungan seperti tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi pendidikan.

Musim kemarau di Provinsi Jawa Timur biasanya berlangsung pada bulan Mei sampai Oktober, sedangkan musim hujan berlangsung pada bulan November

sampai April dan curah hujan rata-rata adalah 178,87 mm serta jumlah hari hujan tertinggi dan terendah masing-masing adalah 13,5 hari/bulan dan 5,6 hari/bulan. Keadaan sumber daya alam di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Keadaan Geografi Provinsi Jawa Timur Tahun 2008

No	Variabel	Keterangan
1	Sumber daya alam yang menonjol	11 jenis
2	Keadaan Alam	
	a. Musim kemarau	Mei s.d. September
	b. Musim penghujan	Oktober s. d April
3	Curah hujan	
	a. Tertinggi	13,5 hari/bulan
	b. Terendah	5,6 hari/bulan

Sumber : Buku IIB Data dan Verifikasi

#### 4. E k o n o m i

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang (harmonis).

Tabel 2.3. Keadaan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2007

No	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan asli daerah (PAD)	1.296,27 M
2	Pendapatan per kapita	4.289.807,05
3	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	219.826 M
4	Upah minimum regional (UMR)	700.000
5	Mata pencaharian menurut sektor	
	a. Pertanian	1.137 M
	b. Pertambangan	14 M
	c. Industri Pengolahan	10.809 M
	d. Listrik, gas dan air	518 M
	e. Bangunan	213 M
	f. Perdagangan	2.463 M
	g. Perhubungan	200 M
	h. Keuangan	6.6 M
	i. Jasa lainnya	1.055 M

Sumber : Buku IIB Data dan Verifikasi

Tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari pendapatan per kapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan asli daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. PAD tahun 2008, kabupaten/kota atau propinsi Jawa Timur sebesar Rp 76.87 milyar, penerimaan dari PBB sebesar Rp 37.404.190.000,00 dan rata-rata pendapatan per kapita Rp 4.289.807,05, sedangkan UMR yang berlaku adalah Rp 700.000,00. Keadaan ekonomi di Provinsi Jawa Timur seperti pada Tabel 2.3.

#### 5. Sosial Budaya dan Agama

Penduduk Jawa Timur didominasi oleh penduduk beragama Islam sebanyak 33.747.695 orang (90%), Protestan sebanyak 486.806 orang (0.36%), Katolik 312.470 orang (1.00%), Hindu sebanyak 129.655 orang (0.01%) dan Budha sebanyak 72.882 orang (0.01%). Untuk mengamalkan ibadahnya pemeluk agama tersebut didukung oleh 35.930 masjid, 163.846 mushalla, 2.284 gereja, 341 pura, dan 186 vihara.

#### 6. Transportasi dan Komunikasi

Sarana dan prasarana perhubungan baik transportasi dan komunikasi merupakan sarana untuk memperpendek jarak antara daerah satu dengan yang lain. Transportasi merupakan alat angkut baik transportasi darat (kereta api, bus, mobil pribadi, sepeda motor, sepeda dan lain-lain) dan transportasi udara, sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Semua sarana tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat tujuan baik dari pedesaan sampai ke perkotaan, daerah perbatasan sampai ke daerah terpencil, ataupun membantu kemudahan siswa dari tempat tinggal menuju ke sekolah.

### B. Kondisi Umum Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Kemajuan pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Program pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, berturut-turut akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD yang terdiri dari SD dan MI, tingkat SLTP yang terdiri dari SMP dan MTs, serta tingkat SM yang terdiri dari SMA, SMK dan MA.

#### 1. Tingkat SD (SD dan MI)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2007/2008, jumlah SD dan MI sebanyak 27.024 lembaga, siswa baru tingkat I sebesar 701.709, siswa seluruhnya sebesar 3.199.899 dan lulusan sebesar 609.929. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 169.470, dengan rincian 86.652 memiliki kondisi baik, 47.763 kondisi rusak ringan dan 29.535 kondisi rusak berat, sehingga terdapat shift sebesar 1,16. Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 277.668 diantaranya yaitu sebanyak 147.536 adalah layak mengajar, dan 130.132 tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 10.109, lapangan olahraga sebesar 10.811 dan ruang UKS sebesar 12.383. Data Pokok SD dan MI Tahun 2007/2008 seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Data Pokok SD dan MI Tahun 2007/2008

No	Komponen	SD	MI	SD+MI
1	Sekolah	20.080	6.683	27.024
2	Siswa Baru Tk.I	554.741	146.998	701.739
3	Siswa	3.199.843	792.056	3.991.899
4	Lulusan	488.684	121.245	609.929
5	Ruang Kelas	125.850	43.620	169.470
	a. Baik	62.555	24.097	86.652
	b. Rusak Ringan	36.277	11.486	47.763
	c. Rusak Berat	23.605	5.930	29.535
6	Kelas	135.225	40.339	175.564
7	Guru	206.430	71.238	277.668
	a. Layak Mengajar	126.600	20.936	147.536
	c. Tidak Layak	56.696	73.436	130.132
8	Fasilitas			
	a. Perpustakaan	7.913	2.196	10.109
	b. Lapangan olahraga	8.225	2.586	10.811
	c. UKS	9.927	2.456	12.383

Sumber : Buku IIB Data dan Verifikasi

Pada Tabel 2.4 tersebut digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar dibandingkan dengan MI. Hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SD sebesar 20.080 dengan jumlah siswa sebanyak 3.991.899. Selain itu terdapat pula perpustakaan sebesar 7.913, dan terdapat lapangan olahraga sebesar 8.225 dan ruang UKS sebesar 9.927.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak dibandingkan dengan MI. Sebaliknya jumlah madrasah swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres.

## 2. Tingkat SLTP ( SMP dan MTs)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2007/2008, jumlah SMP dan MTs sebanyak 5.939, siswa baru tingkat I sebesar 894.846, siswa seluruhnya sebesar 1.721.429 dan lulusan sebesar 488.784. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 49.124, dengan rincian 37.406 memiliki kondisi baik, 5.936 dengan kondisi rusak ringan dan 2.426 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 44.023 sehingga terdapat shift sebesar 0.96. Data Pokok SMP dan MTs Tahun 2007/2008 dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5. Data Pokok SMP dan MTs Tahun 2007/2008

No	Komponen	SMP	MTs.	SMP + MTs
1	Sekolah	3.344	2.595	5.939
2	Siswa Baru Tk.I	430.975	463.871	894.846
3	Siswa	1.259.659	461.770	1.721.429
4	Lulusan	331.108	157.676	488.784
5	Ruang Kelas	33.794	15.330	49.124
	a.Baik	28.109	9.297	37.406
	b.Rusak Ringan	3.672	2.264	5.936
	c.Rusak Berat	1.577	849	2.426
6	Kelas	30.781	13.242	44.023
7	Guru	89.559	56.992	146.551
	a.Layak Mengajar	60.273	29.190	89.463
	c.Tidak Layak	29.206	27.002	57.088
8	Fasilitas			
	a.Perpustakaan	2.088	903	2.991
	b.Lapangan olahraga	938	580	1.518
	c.UKS	1.313	443	1.756
	d.Laboratorium	2.241	325	2.566

Sumber : Buku IIB Data dan Verifikasi

Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 146.551 di antaranya sebanyak 89.463 layak mengajar dan sebanyak 57.088 tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 2.991, lapangan olahraga sebesar 1.518 ruang dan UKS sebesar 1.756 serta laboratorium sebesar 2.566 .

Digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs, hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SLTP sebesar 3.344, dengan jumlah siswa sebesar 1.259.659 dengan ruang kelas sebesar 33.794 dan ditangani oleh guru sebanyak 89.559. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 2.088, lapangan olahraga sebesar 938 ruang UKS sebesar 1.313. dan ruang laboratorium sebesar 2.241.

### 3. Tingkat Sekolah Menengah (SMA, MA, dan SMK)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2007/2008, jumlah SMA, SMK dan MA sebanyak 3.249, siswa baru tingkat I sebesar 434.378, siswa seluruhnya sebesar 1.215.495 dan lulusan sebesar 253.014. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 30.274 dengan rincian 25.689 kondisi baik dan sebanyak 2.292 kondisi rusak ringan serta sebanyak 720 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 27.902 sehingga terdapat shift sebesar 0.95. Guru yang mengajar di SMA, SMK dan MA sebanyak 95.094 diantaranya yaitu sebanyak 51.318 atau (54%) layak mengajar dan serta sebanyak 13.905 atau (15 %) tidak layak mengajar.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 1.784, lapangan olahraga sebesar 1.047 ruang UKS sebesar 1.132, laboratorium sebesar 2.219, ketrampilan sebesar 738, BP sebesar 1656, serbaguna sebesar 776, bengkel sebesar 390 dan ruang praktik sebesar 651.

Bila dibandingkan antara siswa SMA dengan SMK yaitu 508.256 dan 526.450 ternyata jumlah siswa SMK lebih besar. Walaupun jumlah SMA lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah SMK. Selain itu, pembangunan SMA lebih murah sehingga wajar jika SMA lebih banyak.

Dari ketiga jenis sekolah yang ada, jumlah ruang kelas yang paling besar memiliki kondisi yang baik adalah SMA, sedangkan ruang kelas yang memiliki kondisi rusak berat juga terdapat pada SMA. Melihat kondisi yang rusak berat ini, selayaknya jika pada jenis sekolah tersebut diprioritaskan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi terlebih dahulu dibandingkan dengan dua jenis sekolah lainnya.

Selanjutnya, jika dilihat guru yang layak mengajar, ternyata paling banyak di SMA yaitu sebesar 33.655 (88%) dan yang terkecil di MA yaitu sebesar 9.709 atau 40%. Data pokok SMA, MA, dan SMK Tahun 2007/2008 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Data Pokok SMA, MA dan SMK Tahun 2007/2008

No	Komponen	SMA	MA	SMK	SM +MA+SMK
1	Sekolah	1.185	1.056	1008	3.249
2	Siswa Baru Tk.I	176.500	67.577	190.301	434.378
3	Siswa	508.256	180.789	526.450	1.215.495
4	Lulusan	114.956	49.618	88.440	253.014
5	Ruang kelas	13.143	6.680	10.451	30.274
	a. Baik	11.314	5.281	9.094	25.689
	b. Rusak Ringan	853	907	532	2.292
	c. Rusak Berat	279	293	148	720
6	Kelas	12.130	5.704	10.068	27.902
7	Guru	37.995	24.163	32.936	95.094
	a. Layak mengajar	33.655	9.709	16.935	51.318
	b. Tidak layak	3.359	4.116	3.013	13.905
8	Fasilitas				
	a. Perpustakaan	809	465	510	1.784
	b. Lapangan olahraga	428	263	356	1.047
	c. UKS	496	240	396	1.132
	d. Laboratorium	1.514	390	315	2.219
	e. Ketrampilan	289	187	262	738
	f. BP	354	114	188	656
	g. Serbaguna	348	182	246	776
	h. Bengkel	0	0	390	390
	i. Ruang Praktik	0	0	651	651

Sumber : Buku IIB Data dan Verifikasi

Dari ketiga jenis sekolah yang ada, jumlah ruang kelas yang paling besar memiliki kondisi yang baik adalah SMA, sedangkan ruang kelas yang memiliki kondisi rusak berat yang terdapat pada SMA. Melihat kondisi yang rusak berat ini, selayaknya jika pada jenis sekolah tersebut diprioritaskan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi terlebih dahulu dibandingkan dengan dua jenis sekolah lainnya.

#### 4. Perkembangan Penduduk Berdasarkan Usia dalam Pendidikan

##### a. Perkembangan Penduduk Usia Sekolah, Siswa, Guru dan Fasilitas Pendidikan

Melalui berbagai upaya intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian program-program pembangunan pendidikan yang didukung dengan semakin harmonisnya koordinasi antar sektor serta *stakeholders*, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah dapat diwujudkan peningkatan keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya dalam aspek perluasan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ditandai dengan peningkatan APK pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Keberhasilan tersebut dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk menyusun perencanaan program dan proyeksi pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang. Namun demikian, keberhasilan berdasarkan peningkatan APK harus terus dikaji dan dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan proyeksi karena pada dasarnya tinggi rendahnya APK ditentukan juga oleh perkembangan jumlah penduduk.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi terbesar ditinjau dari jumlah penduduknya yang mencapai 37,892 juta. Meskipun demikian berdasarkan data BPS, dari tahun 2000 s.d. 2003 jumlah penduduk usia sekolahnya cenderung menurun.

Dengan adanya kecenderungan penurunan penduduk usia sekolah pada empat tahun terakhir, maka perlu dikembangkan alternatif program yang efisien dalam rangka mencegah adanya fasilitas pendidikan yang dibangun sekarang atau 15-20 tahun yang akan datang namun kemudian menjadi fasilitas yang "idle" pada masa sepuluh tahun mendatang meskipun APM dan APKnya meningkat.

##### b. Perkembangan Penduduk Usia 4-6 Tahun dan Perkembangan TK/RA dan SLB

Selama tiga tahun terakhir jumlah peserta didik Taman Kanak-kanak terus meningkat dari 686.523 siswa pada tahun 2006 meningkat menjadi 735.831 siswa pada tahun 2007, dan menjadi 752.573 pada tahun 2008. Peningkatan jumlah peserta didik tersebut juga disertai dengan peningkatan jumlah lembaga, ruang kelas dan guru TK/RA serta peningkatan APK-nya.

Namun, jumlah penduduk usia Taman Kanak-kanak atau penduduk usia 5 - 6 tahun di Provinsi Jawa Timur menurun pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 1.327.394 siswa pada tahun 2008.

Hal yang sama terjadi pada jenis pendidikan SLB. Jumlah siswa, guru, lembaga dan ruang kelasnya menurun, tetapi sebaliknya jumlah penduduk usia anak berkebutuhan khusus justru naik.

##### c. Perkembangan Penduduk Usia 7-12 Tahun dan Perkembangan SD/MI

Berbeda dengan jenjang TK/RA serta SLB, pada jenjang pendidikan SD/MI, peningkatan jumlah siswa dan peningkatan APM dan APK SD/MI pada kurun waktu tahun 2003 SD/MI tahun 2005, juga disertai dengan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7.

Namun demikian, meskipun jumlah penduduk, usia, jumlah siswa dan APM dan APK meningkat, tetapi jumlah lembaga dan jumlah ruang kelas justru

menurun, sedangkan jumlah gurunya meningkat. Penurunan jumlah lembaga dan ruang kelas tersebut terutama terjadi karena dilaksanakannya program *regrouping* SD/MI.

Jika dibandingkan kondisi SD dengan MI, maka terdapat perbedaan yang cukup mencolok yaitu jumlah siswa SD dibanding MI berkisar 3 berbanding satu, sedangkan jumlah guru berkisar 2 berbanding 1, perbandingan jumlah lembaga berkisar 3 berbanding 1, sedangkan jumlah ruang kelasnya berkisar 4 berbanding 1.

**d. Perkembangan Penduduk Usia 13-15 Tahun dan Perkembangan SMP/MTs.**

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, selama kurun waktu tahun 2006 s.d. 2008 terjadi peningkatan anak usia 13-15 tahun. Demikian juga dengan jumlah siswa dan jumlah sekolah mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya maupun jumlah lulusannya naik pada tahun 2008. Keadaan tersebut juga terjadi pada persentase lulusan yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK. Dari data yang ada anak yang mengulang mengalami penurunan, dan siswa putus sekolah terjadi fluktuasi.

Meskipun terjadi kondisi yang berfluktuasi pada sebagian besar aspek, tetapi ternyata baik APK maupun APM-nya konstan meningkat terus dalam kurun waktu tersebut, yang berarti bahwa penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun tidak terhambat. Aspek yang juga konstan meningkat dalam kurun waktu tersebut adalah jumlah guru dan jumlah ruang kelasnya.

Jumlah lembaga SMP/MTs secara keseluruhan mengalami kenaikan mulai tahun 2006 s.d. tahun 2008. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa juga mengalami kenaikan.

**e. Perkembangan Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Perkembangan SMA/MA/SMK**

Pada kurun waktu tahun 2006 s.d 2008, perkembangan penduduk usia 16-18 tahun berbeda dengan perkembangan penduduk usia 7-12 tahun juga berbeda dengan perkembangan penduduk usia 13-15 tahun. Penduduk usia 16-18 tahun 2006 dan 2008, mengalami peningkatan.

Sedangkan jumlah siswa SMA dan SMK usia 16-18 tahun maupun jumlah siswa keseluruhan meningkat terus dalam kurun waktu tersebut, tetapi jumlah siswa MA mengalami penurunan mulai tahun 2006 sampai tahun 2008, tetapi jumlah guru MA dan lembaga MA setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah guru pada lembaga SMK mengalami kenaikan.

**5. Pendidikan Luar Biasa**

Bentuk Satuan Pendidikan Luar Biasa terdiri atas: Taman Kanak-kanak Luar biasa (TK/RALB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MILB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).

Program prioritas Pendidikan Luar biasa meliputi:

- a. Peningkatan fungsi center di SLB/C Negeri Pembina Lawang, Malang;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Olahraga Adaptif bagi siswa PLB;
- c. Penanganan anak Autis secara meluas dan lebih intensif;
- d. Pengembangan uji coba Pendidikan Terpadu/Inklusi dengan berbagai model;

- e. Uji coba Program Percepatan Belajar (Akselerasi);
- f. Pengembangan program rehabilitasi pada semua jenis kelainan.

Jenis Sekolah Luar Biasa yang jumlah muridnya paling sedikit adalah Sekolah Tuna Laras dan yang terbanyak adalah jenis Sekolah Tuna Rungu. Sedangkan mengenai jumlah guru, nampak bahwa presentase yang terbesar terdapat pada SDLB dan yang terkecil terdapat pada SMLB. Dalam pada itu, dengan jumlah siswa sebesar 9633 dan jumlah guru sebanyak 2015 maka rasio siswa per guru cukup memadai karena setiap guru hanya mengajar antara 4-5 siswa saja.

## 6. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui jalur pendidikan non formal. Penyelenggaraan pendidikan non formal diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan berwirausaha/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan berusaha. Program pendidikan non formal meliputi: (1) Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional; (2) Paket A setara SD/MI; (3) Paket B setara SMP/MTs; (4) Paket C setara SMA/MA; (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (6) Pendidikan berkelanjutan dan pendidikan keluarga.

Program Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional adalah untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka, Buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar). Dilihat dari prosentase penduduk buta huruf maka Angka Buta Huruf bagi penduduk laki-laki lebih rendah dibanding Angka Buta Huruf penduduk perempuan.

Program Paket A setara SD/MI dan Paket B setara SMP/MTs adalah untuk menampung siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs untuk melanjutkan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan jenjang tersebut.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak. Jadi program pendidikan berkelanjutan bukan hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar, tetapi dimaksudkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak usia dini.

Sasaran program PAUD di Jawa Timur adalah usia antara 0-6 tahun. Jumlah sasaran PAUD yang paling banyak adalah anak di usia 4-6 tahun yaitu sebanyak 1.327.394 anak. Sedangkan anak usia 0-4 tahun hampir merata sekitar empat ratus sampai kurang dari lima ratus.

Satuan pendidikan dalam Pendidikan Non Formal adalah Kelompok Belajar (Kejar) Keaksaraan Fungsional. Peserta didik pada jalur Pendidikan Non Formal disebut warga belajar (WB), sedangkan tenaga kependidikannya dikenal dengan sebutan sumber belajar/tutor belajar.

Kelompok Belajar merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Kejar Paket A (untuk buta keaksaraan fungsional dan Angka Arab, buta Bahasa Indonesia, buta pendidikan dasar), dan Kejar Paket A setara SD/MI (untuk putus sekolah kelas 4 s.d. 6 SD/MI), dan Kejar Paket B setara SMP/MTs (untuk putus sekolah SMP/MTs). Sedangkan untuk jenis pendidikan kejuruan oleh pemerintah diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Belajar Usaha (KBU) yang terdiri berbagai rumpun ketrampilan.

Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), dan Lembaga Kursus, Khusus bagi anak yang berusia dibawah 5 tahun (Balita) diselenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan satuan-satuan pendidikan sekolah maupun luar sekolah serta program lintas sektoral yang relevan. Pendidikan berkelanjutan ini juga diperuntukan bagi masyarakat yang tidak/belum memiliki keterampilan dan tidak/belum bekerja serta tidak mampu karena faktor ekonomi, agar dapat berkompetisi di dunia kerja maupun berusaha membuka lapangan kerja.

Jumlah warga belajar Paket B lebih banyak dibanding dari Paket A yaitu 32.449 orang berbanding 6.763 orang. Ini berarti masyarakat yang putus sekolah tingkat SMP/MTs, lebih banyak dari yang putus sekolah tingkat SD/MI, akan tetapi jumlah kelompok belajar antara Paket A dan Paket B jauh lebih banyak paket B yaitu 338 kelompok dan 1.622 kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota per kelompok belajar pada paket A lebih sedikit dari anggota per kelompok belajar pada Paket B. Masalah lain yang tampak yaitu kurangnya tenaga tutor. Hal ini dapat dilihat dari tenaga tutor pada Paket A yang hanya berjumlah 1540 orang, pada Paket B mencapai 4290 orang, dan Paket C 3847 orang.

## 7. Keragaman Antardaerah

### a. Akses terhadap pendidikan SD/MI

Dalam menggambarkan kondisi akses terhadap pendidikan dasar Provinsi Jawa Timur digunakan data tahun 2006 dan 2008. Pada tahun 2006, APM SD/MI mencapai 96,71%, tahun 2007 sebesar 97,34%, dan pada tahun 2008 sebesar 97,42. Dibanding dengan rerata Provinsi tersebut, akses terhadap pendidikan SD/MI pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan adanya keragaman. Keragaman tersebut dari setinggi 130,346% sampai rendah 87,29%.

Secara keseluruhan dibandingkan dengan rerata Provinsi, 3 kabupaten/kota yang memiliki angka partisipasi tertinggi adalah kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Pasuruan. Sebaliknya 3 Kabupaten/kota yang proporsi anak usia 7-12 tahun yang terlayani pendidikan paling rendah adalah Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Jember.

Pada tahun 2005/2006, keragaman tiap kabupaten/kota dari yang tertinggi sebesar 142,60% hingga terendah, yaitu 100,47%. Keduanya secara berurutan adalah kota Madiun dan Kabupaten Mojokerto. Untuk 3 kab/kota dengan APM tertinggi masing-masing adalah kota Madiun, kota Kediri, dan kota Blitar. Sedangkan 3 terendah terdapat di Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Situbondo.

Dari data tersebut terlihat bahwa di setiap kabupaten/kota ada anak usia 7-12 tahun yang belum terlayani pendidikannya dan ini mengindikasikan perlunya upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar yang lebih, terutama terhadap kabupaten/kota yang APM nya masih di bawah rerata Provinsi.

### b. Akses SMP/MTs

Dalam menggambarkan kondisi akses terhadap pendidikan dasar Provinsi Jawa Timur digunakan data tahun 2004/2005 dan 2005/2006. Pada tahun 2004/2005, tercatat APM SMP/MTs di Jawa Timur mencapai 83.63%, sedangkan tahun 2005/2006 sebesar 64,17%.

Dibandingkan dengan rerata provinsi tersebut, akses terhadap pendidikan SMP/MTs pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan adanya keragaman. Keragaman tersebut dari tertinggi 116,96%) sampai terendah 35,67%.

Dari data yang diperoleh terlihat bahan di setiap kabupaten/kota ada anak usia 13-15 tahun yang belum terlayani pendidikannya dan ini mengindikasikan perlunya upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar yang lebih terutama terhadap kabupaten/kota yang APM nya masih di bawah rerata provinsi.

Terjadi kesenjangan APK SMP/MTs antar masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. APK tertinggi dengan APK sebesar 142,31% dan terendah sebesar 92,43. Prioritas kedepan perlu dirumuskan program untuk mampu mengatasi kesenjangan tersebut sehingga minimal memenuhi target capaian nasional sebesar 96,18% pada tahun 2008.

#### **8. Keragaman Antarjenis Kelamin**

Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dilihat dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan bahwa disparitas gender persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang mengikuti pendidikan formal bahwa pada partisipasi usia 7-12 tahun (SD/MI) sudah tidak menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan mulai terjadi pada kelompok usia 13-15 tahun (SLTP) ada perbedaan relatif kecil.

#### **9. Pendidikan Berbasis Bakat dan Minat**

Untuk mewadahi potensi siswa yang berbakat dan minat khusus misalnya berbakat atau memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi maka dimulai tahun pembelajaran 2009/2010 di Jawa Timur diselenggarakan SMA Negeri Olahraga (SMANOR) yang lokasinya di kecamatan Buduran, Sidoarjo. Untuk sementara baru ada enam program studi yakni gulat, judo, pencak silat, atletik, renang, dan sepak takraw. Pada tahun 2010 ditambah program studi panahan dan senam.

### **C. Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah**

#### **1. Pemerataan Pendidikan**

Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu 113,73 % dan yang terendah di tingkat SM yaitu 67,53%. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang ada di jenjang tersebut. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan gender dilihat dari APK pada tingkat SD dibandingkan dengan tingkat SMP. Bila dilihat dari desa dan kota, APK yang lebih tinggi terdapat di desa yaitu 116.78 % pada tingkat SD dan terendah terdapat di kota yaitu 108.61% pada tingkat SMP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat SMP dan tingkat SM. Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SD paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya.

Tabel 2.7. Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2007/2008

No	Indikator	SD +MI	SMP +MTs	SM + MA
1	APK	113.73	102.69	69.29
	Laki-laki	108.24	80.75	
	Perempuan	102.25	83.59	
	Kota	108.61	77.11	
	Desa	116.78	84.97	
2	APM	97.42	82.62	49.69
3	Perbandingan Antarjenjang		5.50	1.90
4	Rasio			
	-Siswa/sekolah	149	284	362
	-Siswa/Kelas	23	38	44
	-Siswa/Guru	15	12	13
	-Kelas/R.Kelas	1.03	0.90	0.90
	-Kelas/Guru	0.76	1.00	0.30
5	Angka Melanjutkan	89,20	72,89	-
6	Angka Mengulang	3.09	0.12	0,24
7	Angka Putus Sekolah	0.22	0.29	0.84
8	Angka Lulusan	98.98	97.54	96.82
9	Tingkat Pelayanan Sekolah	109	91	111

Sumber : Buku IIB Data dan Verifikasi

APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu 97,42 persen dan yang terendah di tingkat SM yaitu 49,69 %. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD+MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat di tingkat SD+MI.

Bila sekolah dibandingkan antar jenjang, maka makin tinggi sekolah makin kurang, hal itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SD+MI berbanding tingkat SMP+MTs sebesar 5,50 dan tingkat SLTP berbanding tingkat SM sebesar 1,90. Makin sedikitnya jumlah sekolah yang diperlukan di daerah tersebut.

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di tingkat SMK dengan angka 514 siswa/sekolah dan terjarang terdapat di tingkat SD dengan angka 149. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen. Keheterogenan sekolah juga terlihat dari adanya tipe sekolah yaitu tipe A, B,C dan kecil. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terpadat terdapat di tingkat SMP + MTs dan SM + MA yaitu 38 dan 44 dan terjarang terdapat di tingkat SD+MI yaitu 23.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD + MI yaitu 15 dan terendah terdapat pada SMP+ MTs yaitu 12. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SD + MI yaitu sebesar 1,03. Hal itu berarti

bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya, terdapat ruang kelas yang tidak digunakan ini terlihat pada rasio di bawah 1 yang terdapat di tingkat SMA dan MA sebesar 0,90 dan SMP + MTs juga sebesar 0.90.

Sejalan dengan perbandingan antar sekolah di tingkat SMP dan SD yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitu 89.20. Diharapkan bila jumlah tingkat SMP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SM lebih kecil yaitu 72.89. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SM dan SMP juga rendah.

Rendahnya jumlah sekolah di jenjang makin tinggi dapat dilihat pada tingkat pelayanan sekolah. Pada tingkat SM pelayanan sekolah lebih besar yaitu 111 jika dibandingkan dengan tingkat SD atau SMP. Hal itu disebabkan karena pada tingkat SM telah terjadi pemerataan. Sebaliknya, untuk tingkat SD dan bahkan tingkat SMP, dilihat dari tingkat pelayanan sekolah belum merata yang diindikasikan pada TPS tingkat SMP sebesar 91 dan lebih besar di tingkat SD sebesar 109.

Perbedaan pencapaian di tingkat SD, SMP dan SM juga karena akibat perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah, kepadatan terbesar terdapat di tingkat SD + MI dan terkecil terdapat di tingkat SMP + MTs. Di samping itu, banyak desa tertinggal juga mempengaruhi kinerja pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan indikator yang terdapat pada Tabel 3.7 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SD+MI. Mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SMP+MTs dan tingkat SM. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut. Namun hal ini wajar dan merupakan indikator nasional karena umumnya motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya lebih tinggi pada tingkat SD.

#### a. Tingkat Sekolah Dasar (SD dan MI)

Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK terbesar adalah SD yaitu 110.22 persen lebih besar dibandingkan dengan MI sebesar 24,98 persen. Hal yang sama juga terjadi pada APM. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan gender baik di SD maupu di MI. Untuk desa dan kota, ternyata juga terjadi perbedaan yaitu kota lebih baik dibandingkan dengan desa baik untuk SD maupun MI. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan MI. Di daerah ini anak yang bersekolah di SD lebih banyak dibandingkan dengan MI sesuai dengan jumlah sekolah yang ada.

Tabel 2.8. Indikator Pemerataan SD dan MI Tahun 2007/2008

No	Indikator	SD	MI	SD + MI
1	APK	110,22	24,98	135,20 %
	▪ laki-laki			124.25 %
	▪ perempuan			105.08 %
	▪ kota			108.61 %
	▪ desa			116.78 %
2	APM			97.42 %
3	Rasio			
	▪ Siswa/sekolah			154

No	Indikator	SD	MI	SD + MI
	▪ Siswa/kelas			23
	▪ Siswa/guru			15
	▪ Kelas/R.kelas			1.04
	▪ Kelas/guru			0.76
4	Tingkat Pelayanan Sekolah			120
5	Kepadatan penduduk			756/km <sup>2</sup>
6	Persentase Desa Tertinggal			24.22 %

Sumber: Buku III Indikator

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah di SD+MI adalah 154. Hal itu menunjukkan bahwa SD+MI di daerah ini lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas di SD+MI adalah 23. Hal ini menunjukkan telah cukupnya SD dan MI yang ada .

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar di SD+MI yaitu 18. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di MI dan SD. Rasio kelas/ruang kelas yang paling sering digunakan adalah di SD dan MI yaitu sebesar 1.04. Hal itu berarti bahwa pada SD dan MI masih kurang ruang kelas jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Selain itu, sesuai dengan jumlah sekolah, maka tingkat pelayanan sekolah di SD juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan MI.

Berdasarkan indikator pencapaian setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan MI. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada SD. Oleh karena itu, agar kinerja SD sebanding dengan MI, maka diperlukan penanganan lebih lanjut untuk MI.

Dengan melihat hasil indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa pendataan penduduk usia sekolah dan banyaknya desa tertinggal tidak mempengaruhi pencapaian indikator pemerataan. Hal itu ditunjukkan dengan masih tingginya angka partisipasi bersekolah.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan sekolah. Bila APK tingkat SD rendah, ternyata rasio siswa per kelas juga rendah yaitu 23. Hal itu menunjukkan bahwa minat bersekolah di tingkat SD kurang. Hal itu juga terlihat dari rendahnya siswa per sekolah, sedangkan TPS ternyata rendah yang berarti kesempatan belajar cukup tinggi.

Bila dikaitkan dengan tingkat kesulitan ke sekolah terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan daerah. APK tingkat SD yang rendah disebabkan karena kesulitan ke sekolah. Ini berarti di daerah tersebut merupakan daerah sulit dijangkau, sehingga anak tidak bersekolah. Selain itu, bila dilihat dari desa tertinggal ternyata hampir sebagian sekolah tersebut terdapat di desa tertinggal. Selain itu, kepadatan anak usia 7-12 tahun memang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi daerah. Bila hanya dilihat

dari pendidikan semata, maka akan sulit dilakukan pemecahannya tanpa mengikutsertakan faktor di luar pendidikan yang mempengaruhi.

**b. Tingkat SMP (SMP dan MTs.)**

Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK terbesar adalah SMP yaitu 82.18 persen jika dibandingkan dengan MTs yaitu 22.59 persen. Hal yang sama juga terjadi pada APM. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan gender baik di SMP maupun di MTs. Untuk desa dan kota, ternyata juga terjadi perbedaan yaitu desa lebih baik dibandingkan dengan kota baik untuk SMP maupun MTs yaitu sebesar 84.97 dan 77.11.

Banyaknya porsi SMP pada APK dan APM disebabkan anak yang bersekolah di SMP lebih banyak dibandingkan dengan MTs. Sesuai dengan jumlah sekolah yang ada, SMP lebih banyak jika dibandingkan dengan MTs.

Untuk melihat kinerja SMP dan MTs, indikator berikut membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah di SMP adalah 285. Hal itu menunjukkan bahwa SMP di daerah ini lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas di SMP adalah 41 dan MTs 36. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah SMP di daerah tersebut masih kurang. Di sisi lain juga ada ketentuan siswa per kelas harus 40 anak, sebaliknya MTs. telah mencukupi. Patut untuk dicatat berdasarkan ketentuan standar nasional oleh BSNP rasio siswa per kelas untuk SMP/MTs adalah 1 : 28.

Tabel 2.9. Indikator Pemerataan SMP dan MTs. Tahun 2007/2008

No	Indikator	SMP	MTs	SMP+ MTs
1	APK	81,18%	21,51%	102,69 %
	- laki-laki			82,62 %
	- perempuan			83,59 %
	- kota			77,11 %
	- desa			84,97 %
2	APM	65,75	16,87	82.62 %
3	Rasio			
	- Siswa/sekolah	285	283	284
	- Siswa/kelas	41	36	38
	- Siswa/guru	13	12	11
	-Kelas/R.kelas	0,88	0,92	0.90
	-Kelas/guru			1,00
4	Tingkat Pelayanan Sekolah			91
5	Kepadatan penduduk			38
6	Persentase Desa Tertinggal			24,22

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar di SMP yaitu 13. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di MTs jika dibandingkan dengan di SMP. Rasio ruang kelas yang paling sering digunakan adalah di MTs yaitu sebesar 0,92. Hal ini berarti bahwa pada MTs masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan

jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Berdasarkan indikator yang terdapat dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMP dan MTs, maka dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan MTs. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut. Dengan demikian, untuk menghasilkan kinerja yang sama antara SMP dan MTs, perlu dilakukan penanganan lebih lanjut untuk MTs.

Selanjutnya bila dilihat dari Indikator dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara tingkat partisipasi dengan keadaan sekolah. Bila APM tingkat SMP rendah yaitu 65,75 ternyata rasio siswa per kelas juga rendah yaitu 41. Namun, bila dilihat rasio siswa per sekolah ternyata cukup tinggi yaitu 285, sedangkan TPS ternyata tinggi yang berarti kesempatan belajar memang kurang. Hal itu menunjukkan bahwa minat bersekolah di tingkat SMP kurang karena memang jumlah sekolahnya tidak mencukupi.

Bila dikaitkan dengan tingkat kesulitan ke sekolah yang terdapat pada Indikator dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara tingkat partisipasi dengan keadaan daerah. APM tingkat SMP yang rendah disebabkan karena kesulitan ke sekolah. Ini berarti di daerah itu merupakan daerah sulit dijangkau sehingga anak tidak bersekolah. Selain itu, bila dilihat dari desa tertinggal ternyata hampir sebagian sekolah tersebut yaitu 24,22 persen terdapat di desa tertinggal. Oleh karena itu, dalam pemecahannya perlu dibangun sekolah baru sehingga anak dapat tertampung lebih banyak lagi.

Tambahan pula, kepadatan anak usia 13-15 tahun memang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi daerah. Bila hanya dilihat dari pendidikan semata, maka akan sulit dilakukan pemecahannya tanpa mengikutsertakan faktor di luar pendidikan yang mempengaruhi.

Dengan melihat indikator di atas dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk usia sekolah dan banyaknya desa tertinggal memberi pengaruh terhadap pencapaian indikator pemerataan. Kondisi itu ditambah dengan kurangnya jumlah sekolah yang ada. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya angka parsipasi bersekolah di tingkat SMP.

### c. Tingkat SM ( SM dan MA)

Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK terbesar adalah SMA yaitu 54,42% jika dibandingkan dengan SMK dan MA. Hal yang sama juga terjadi pada APM tingginya porsi APK dan APM pada SMA disebabkan banyaknya siswa yang bersekolah di SMA dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat karena jumlah SMA juga lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat.

Untuk melihat kinerja SMA, SMK dan MA indikator berikut membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas SMA+MA terbesar adalah 46 dan terkecil adalah 31 ketentuan siswa per kelas harus 40 anak, sebaliknya SMK belum mencukupi karena rasio siswa per kelas sebesar 56 anak

Tabel 2.10. Indikator Pemerataan SM dan MA Tahun 2007/2008

No	Indikator	SM	MA	SM + MA
1	APK	55,18%	14,11%	69.29
2	APM			49.69
3	Rasio			
	-Siswa/Sekolah			374
	-Siswa /kelas	46	31	44
	-siswa /guru	20		13
	-Kelas/R.Kelas	0,95		0,90
	-Kelas / Guru			0.30
4	Tingkat Pelayanan Sekolah			111
5	Kepadatan Penduduk			39 km <sup>2</sup>
6	Persentase Desa Tertinggal			24,22

Sumber : Buku III Indikator

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar di SM yaitu 20. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di SMA dan SMK jika dibandingkan dengan di MA. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah di SM yaitu sebesar 0,95. Hal itu berarti bahwa pada SM masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Selain itu, sesuai dengan jumlah sekolah, maka tingkat pelayanan sekolah di SMA juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat.

Selanjutnya bila dilihat Indikator, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan sekolah. Bila APK tingkat SM rendah yaitu 54.42 ternyata rasio siswa per kelas juga rendah yaitu 40. Namun, bila dilihat rasio siswa per sekolah ternyata cukup tinggi yaitu 374, sedangkan TPS ternyata tinggi yang berarti kesempatan belajar memang kurang. Hal itu menunjukkan bahwa minat bersekolah di tingkat SM kurang karena memang jumlah sekolahnya tidak mencukupi.

Bila dikaitkan dengan tingkat kesulitan ke sekolah yang terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan daerah. APK tingkat SM rendah, hal itu disebabkan karena kesulitan ke sekolah yang berarti di daerah itu merupakan daerah sulit sehingga anak tidak bersekolah. Selain itu, bila dilihat dari desa tertinggal ternyata hampir sebagian sekolah tersebut yaitu 24.22 % terdapat di desa tertinggal. Oleh karena itu, dalam pemecahannya perlu dibangun sekolah baru sehingga anak dapat tertampung lebih banyak lagi.

Tambahan pula, kepadatan anak usia 16-18 tahun memang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi daerah. Bila hanya dilihat dari pendidikan semata, maka akan sulit dilakukan pemecahannya tanpa mengikutsertakan faktor di luar pendidikan yang mempengaruhi.

Dengan melihat hasil indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk usia sekolah dan banyaknya desa tertinggal kelihatannya memberi pengaruh terhadap pencapaian indikator pemerataan. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya angka partisipasi bersekolah di tingkat SM.

## 2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu : (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas dan (5) biaya.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada tingkat SD + MI yaitu sebesar 3.09% dan terendah terdapat pada tingkat SMP + MTs yaitu sebesar 0.12%. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SM+MA yaitu sebesar 0,84% dan terendah terdapat pada tingkat SD + MI yaitu sebesar 0,24%. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka tertinggi terdapat pada tingkat SD + MI yaitu sebesar 98,98% dan terendah terdapat pada tingkat SMA + MA yaitu sebesar 96,82%. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru dengan bidang studi yang diajarkan. Khusus SMP, banyaknya guru yang sesuai terlihat pada bidang studi IPS, yaitu sebesar 148.53 % dan paling tidak sesuai terlihat pada bidang studi muatan lokal, yaitu sebesar 11.75 %, sedangkan SMA, banyaknya guru yang sesuai terlihat pada bidang studi pendidikan seni yaitu sebesar 115.01 % dan paling tidak sesuai terlihat pada bidang studi Geografi yaitu sebesar 91.31%. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SMA yaitu sebesar 94.32 % sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 19.52%. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Tabel 2.11. Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2007/2008

No	Indikator	SD + MI	SLTP+ MTs	SM +MA
1	Rasio Nem lulusan/siswa baru			
2	Angka Mengulang	3.09	0.12	0.24
3	Angka Putus Sekolah	0.22	0.29	0.84
4	Angka Lulusan	98.98	98.55	96.82
5	Angka Kelayakan Mengajar			
	a. Layak		80,13%	
	b. Semi Layak			
	c. Tidak Layak			
6	Persentase Kesesuaian Guru Mengajar			
	a. PPKn		101.78	92.36
	b. Pend. Agama		99.10	104.11
	c. Bhs .Indonesia		99.07	99.58
	d. Bhs. Inggris		99.09	101.36
	e. Sejarah & Sejarah Budaya			105.80
	f. Pend. Jasmani		103.99	97.97
	g. Matematika		102.61	105.01
	h. IPA		126.24	
	h.1 Fisika			106.24
	h.2 Biologi			104.25
	h.3 Kimia			102.80

No	Indikator	SD + MI	SLTP+ MTs	SM +MA
	i. IPS		148.53	
	i.1 Ekonomi			94.97
	i.2 Sosiologi			92.30
	i.3 Geografi			91.31
	j. Seni & Kerajinan		104.94	115,01
	k.Muatan Lokal		11,75	
	l.Tata Negara			113.82
	m.Antropolgi			106.87
	n.Pendidikan Seni			115.01
	o.Bahasa Asing			98.90
	p.B dan P		23.39	110.54
	q. Lain - lain			94.74
7.	Persentase Kondisi Ruang Kelas			
	a. Baik	46.34	85.64	94,32
	b.Rusak Ringan	34.15	10.52	14.93
	c. Rusak Berat	19.52	3.84	1.13
8.	Persentase Fasilitas Sekolah			
	a.Perpustakaan	59.70	56.31	67.51
	b.Lapangan OR	49.71	29.26	36.62
	c.UKS	60.28	32.58	39.00
	d.Laboratorium		45.81	100.90
	e.Ketrampilan			25.23
	f.Bimbingan Penyuluhan			24.80
	g.Serbaguna			28.09
	h.Bengkel			28.09
	i.ruang Praktik			
9.	Angka Partispasi (%)			
	a.Pemerintah Pusat	61.60	36.31	53.90
	b.Orang Tua	12.79	26.55	22.75
	C.Pemerintah Daerah	25.13	19.09	11.46
10	Satuan biaya (00 Rp)	1691.64	145.23	295.66

Sumber : Buku III Indikator

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terendah ada pada tingkat SLTP + MTs yaitu sebesar 56,31 % dan tertinggi ada pada tingkat SM + MA sebesar 67,51%. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada tingkat SD + MI yaitu sebesar 49,71% dan terendah ada pada tingkat SMP + MTs sebesar 29,26 %. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SD + MI yaitu sebesar 60,28 %. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut, maka tingkat SLTP + MTs memiliki angka terbesar.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada partisipasi pemerintah pusat dengan persentase terbesar pada tingkat SD/MI. Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat di tingkat SD dan partisipasi orang tua siswa lebih banyak terdapat di tingkat SMP/MTs.

Melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SLTP + MTs mempunyai kinerja yang lebih unggul ini diambil dari layaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

a. Tingkat SD (SD dan MI)

Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa 61.85 % siswa baru tingkat I SD yang berasal dari tamatan TK atau sejenis lebih besar jika dibandingkan dengan MI. Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada MI yaitu sebesar 4.78 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada MI yaitu sebesar 0,82 persen dan angka putus sekolah terendah terdapat pada SD yaitu sebesar 0.39 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada SD. Hal ini ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka presentase guru yang layak mengajar di SD lebih besar daripada MI. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada MI yaitu sebesar 58,23 persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak juga terdapat pada MI yaitu sebesar 10,95 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Tabel 2.12. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD Tahun 2007/2008

No	Indikator	SD	MI
1	Persentase Lulusan TK/RA/BA	61.85	63.46
2	Angka Mengulang	3,81	4.78
3	Angka Putus Sekolah	0.39	0.82
4	Angka Lulusan		
5	Angka Kelayakan Mengajar		
	a. Layak	na	na
	b. Semi Layak	na	na
	c. Tidak Layak	na	na
6	Persentase Kondisi R. Kelas		
	a. Baik	47,31	58.23
	b. Rusak ringan	31.08	27.04
	c. Rusak berat	21.93	10,95
7	Persentase Fasilitas Sekolah		
	a. Perpustakaan	59.70	47.20
	b. Lapangan OR	49.71	39.64
	c. UKS	60.28	43.48
	d. Laboratorium		
8	Angka Partisipasi (persen)		
	a. Pem Pusat	5.49	6.49
	b. Orang tua	8.43	4.85
	c. Pemda	36.44	7.17
9	Satuan biaya (000 Rp)	2245.27	

Sumber : Buku III Indikator

Berdasarkan indikator mutu dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SD dan MI, maka dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan MI. Kinerja yang lebih unggul ini

diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

**b. Tingkat SLTP (SLTP dan MTs)**

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, berdasarkan data pada tabel 3.13 angka mengulang untuk SMP sebesar 0,15%, sedangkan pada MTs yaitu sebesar 0.22 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada SMP yaitu sebesar 0,19%, sedangkan untuk MTs 0.68 persen, dan angka lulusan untuk SMP sebesar 96,43% dan MTs yaitu sebesar 93.06 %. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja pendidikan di tingkat sekolah menengah cukup baik, tetapi masih memerlukan kerja keras bagi semua pihak terkait untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Tabel 2.13. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP/MTs Tahun 2007/2008

No	Indikator	SLTP	MTs
1	Angka Mengulang	0.15	0.22
2	Angka Putus Sekolah	0.19	0.68
3	Angka Lulusan	96.43	93.06
4	Angka Kelayakan Mengajar		
	a. Layak	84.14	73.39
	b. Semi Layak	7.40	9.69
	c. Tidak Layak	8.46	16.92
5	Persentase Kesesuaian guru mengajar		
	a. PPKn	101.78	na
	b. Pendidikan Agama	99.10	na
	c. Bhs. Indonesia	99.07	na
	d. Bhs. Inggris	99.09	na
	e. Sejarah & Sejarah Budaya	na	na
	f. Pendidikan Jasmani	103.99	na
	g. Matematika	102.61	na
	h. IPA	126.24	na
	i. IPS	151.39	na
	j. Seni & kerajinan	104.94	na
	k. Muatan Lokal	18.47	na
	m. Lain-lain		
7.	Persentase Kondisi R. Kelas		
	a. Baik	88.57	77.13
	b. Rusak ringan	8,00	15.23
	c. Rusak berat	2.93	7.64
8	Persentase Fasilitas Sekolah		
	a. Perpustakaan	146.48	41.00
	b. Lapangan OR	259.57	25.41
	c. UKS	239.84	21.20
	d. Laboratorium	240.19	16.56
9.	Angka Partisipasi (persen)		
	a. Pem Pusat	11.82	25.73
	b. Orang tua	24.56	48.93
	c. Pemda	57.58	4.23
10.	Satuan biaya (000 Rp)	452.09	398.05

Sumber: Buku III Indikator

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SMP sebesar 84,14%, sedangkan MTs sebesar 73,37%. Berdasarkan data tersebut, masih diperlukan kinerja yang sinergis antara dinas pendidikan Propinsi Jawa Timur dan dinas pendidikan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu guru. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada SMP yaitu sebesar 88,57 persen, sedangkan pada MTs sebesar 77,13%. Sedangkan ruang kelas yang rusak ringan-besar adalah SMP sebesar 11,43%, sedangkan MTs adalah 22,57%. Banyaknya ruang kelas yang rusak ringan-berat (di atas 10%) ini menunjukkan mutu prasarana masih memerlukan perhatian dari pemerintah dan apabila tidak ditangani secara sungguh-sungguh berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah SMP memiliki perpustakaan lebih besar. Jumlah lapangan olahraga lebih besar pada SMP, ruang UKS lebih besar pada SMP, dan ruang laboratorium lebih besar pada SMP. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki keempat fasilitas tersebut, maka SMP memiliki angka terbesar.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada Partisipasi Pemerintah Pusat dengan persentase terbesar pada tingkat Mts. Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat di MTs, demikian juga partisipasi orang tua siswa. Ternyata partisipasi pemerintah daerah paling rendah jika dibandingkan dengan partisipasi lainnya.

Berdasarkan indikator mutu yang dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMP dan MTs, maka dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan MTs. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut.

#### c. Tingkat SM (SMA, SMK, MA)

Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada MA yaitu sebesar 0.57 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada SMK yaitu sebesar 5.44 persen, dan ternyata angka lulusan tertinggi terdapat pada SMA yaitu sebesar 93.66 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa mutu masukan terbaik adalah pada SMA. Hal ini ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka masalah ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk segera menangani hal tersebut, sehingga mutu guru akan mengalami peningkatan. Dengan demikian diharapkan kualitas PBM dan lulusan dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.14. Indikator Mutu Pendidikan tingkat SM  
Tahun 2007/2008

No	Indikator	SMA	MA	SMK
1	Rasio NEM Lulusan/siswa baru			
2	Angka Mengulang	0.36	0.57	0.25
3	Angka Putus Sekolah	0.28	1.05	5.44
4	Angka Lulusan	93,66		
5	Angka Kelayakan Mengajar			
	a. Layak	78.23	60.29	72.49
	b. Semi Layak	15.52	23.94	18.83
	c. Tidak Layak	6.24	16.63	8.68
6	Persentase Kesesuaian guru mengajar			
	a. PPKn	90.02		
	b. Pendidikan Agama	102.92		
	c. Bhs. Indonesia	98.15		
	d. bhs. Inggris	101.29		
	e. Sejarah & Sejarah Budaya	103.83		
	f. pendidikan Jasmani	96.34		
	g. Matematika	103.79		
	h. IPA			
	h.1 Fisika	105.91		
	h.2 Biologi	104.19		
	h.3 Kimia	102.28		
	i. IPS			
	i.1 Ekonomi	94.36		
	i.2 Sosiologi	87.12		
	i.3 Geografi	90.72		
	j. Seni & kerajinan			
	k. Muatan Lokal			
	l. Tata Negara	96.06		
	m. Antropologi	99.29		
	n. Pendidikan Seni	105.41		
	o. Bahasa Asing	99.33		
	p. B dan P	1		
	q. Lain-lain	94.78		
7	Persentase Fasilitas Sekolah			
	a. Perpustakaan	54.39	51.00	81.13
	b. Lapangan OR	30.76	25.76	40.57
	c. UKS	28.07	15.74	50.18
	d. Laboratorium	45.61	39.06	45.99
8	Angka Partisipasi (persen)			
	a. Pem Pusat	75.28	18.59	23.92
	b. Orang tua	35.07	63.28	64.43
	c. Pemda	16.40	3.21	0.13
10.	Satuan biaya (000 Rp)	568.03	902.76	

Sumber : Buku III Indikator

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah SMA memiliki perpustakaan terbesar jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada SMA, UKS terbesar pada SMA, ruang laboratorium terbesar pada SMA. Dengan

melihat mutu sarana prasarana dapat dikatakan bahwa SMA mempunyai mutu prasarana terbaik.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah Pemerintah Pusat. Pada bantuan pemerintah pusat dengan persentase terbesar pada SMA, jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya. Partisipasi pemerintah pusat terbanyak terdapat di SMA, demikian juga partisipasi orang tua siswa persentase terbesar pada SMK, sedangkan partisipasi pemerintah daerah terbesar dari SMA.

Dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMA, SMK dan MA, maka dapat dikatakan bahwa SMA dan SMK mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan MA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut.

### 3. Relevansi Pendidikan

Tidak seperti dua indikator sebelumnya yang menggunakan jenis indikator yang sama, indikator untuk relevansi antara tingkat SD, SMA dan SMK berbeda. Untuk SD merupakan relevansi antara muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan oleh daerah, untuk SMA merupakan relevansi antara siswa menurut jurusan di SMA dengan kriteria dan prosedur penjurusan di SMA, sedangkan untuk SMK adalah relevansi antara lulusan dengan terserap di sektor mata pencaharian. Oleh karena itu, analisisnya juga dibedakan antara ketiga jenis sekolah tersebut.

#### a. Tingkat SD (SD dan MI )

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa 38 kabupaten/kota mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kurikulum muatan lokal yang ada dengan mata pelajaran yang dikembangkan di SD. Selanjutnya, bila dilihat dari sektor dominan yang ada pada setiap kabupaten/kota atau kecamatan tersebut, maka kurikulum muatan lokal dan mata pelajaran yang dikembangkan di tingkat SD pada semua kabupaten/kota relevan dengan lingkungan yang ada.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka kabupaten/kota atau kecamatan yang tidak ada relevansinya hendaknya dijadikan prioritas utama untuk ditangani lebih lanjut sehingga relevan, misalnya dengan mengganti mata pelajaran yang dikembangkan sesuai dengan sektor dominan atau lingkungan sekolah.

#### c. Tingkat SM (SMA, SMK, dan MA)

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa kabupaten/kota 38 mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kriteria dan prosedur penjurusan dengan jumlah siswa yang ada di SMA. Kriteria dan prosedur penjurusan dilaksanakan dalam empat kriteria yaitu berdasarkan prestasi, tes bakat/minat, gabungan dan lainnya.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka kabupaten/kota atau kecamatan yang tidak ada relevansinya hendaknya dijadikan prioritas utama untuk ditangani lebih lanjut sehingga relevan, misalnya dengan mengharuskan setiap SMA menggunakan kriteria gabungan atau minimal menggunakan prestasi atau minat dalam melaksanakan penjurusan di tingkat III SMA.

#### d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Lulusan SMK bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa seharusnya dapat terserap dilapangan kerja di tiga sektor yaitu pertambangan, penggalian dan industri pengolahan, serta bangunan, kelompok pertanian dan kehutanan terserap di sektor pertanian dan kehutanan, kelompok bisnis dan manajemen terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan keuangan, kelompok pariwisata terserap di sektor angkutan dan jasa kemasyarakatan, kelompok kesejahteraan masyarakat terserap di dua sektor yaitu listrik, gas dan air dengan jasa kemasyarakatan, sedangkan kelompok seni dan kerajinan terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan angkutan.

Dari jumlah SMK yang ada, semuanya yang telah melaksanakan pendidikan sistem ganda (PSG), dalam wujud praktik kerja industri (prakerin) hal ini membuktikan masih ada relevansi antara SMK dengan dunia industri atau dunia usaha. Dari beberapa Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang ada, telah 100 persen melaksanakan prakerin. (lihat Tabel 4.3 Hasil Indikator, Buku III). Kondisi seperti ini menyebabkan adanya kesesuaian antara SMK dengan dunia industri dan dunia usaha.

Selain itu, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan belum terdapat relevansi antara lulusan SMK dengan lapangan kerja yang ada. Hal itu dibuktikan dengan masih sedikitnya lulusan yang dapat diserap oleh sektor mata pencaharian di masyarakat. Lulusan yang banyak dihasilkan adalah lulusan dari kelompok teknologi dan industri, sedangkan yang paling sedikit adalah dari kelompok seni dan kerajinan. Di samping itu, jenis lapangan kerja yang banyak menyerap lulusan adalah dari sektor teknologi dan industri dan yang paling sedikit adalah dari sektor pertambangan dan penggalian

Dengan menggabungkan dari 9 sektor menjadi 6 sektor sesuai dengan kelompok di SMK, maka lulusan kelompok industri dan pengolahan merupakan lulusan terbesar yang dapat diserap di lapangan kerja, sedangkan kelompok pertambangan dan pengendalian merupakan lulusan terkecil yang dapat diserap di lapangan kerja dan lulusan yang masih menganggur sebesar 53.09 persen. Dengan kondisi semacam ini, yang paling cocok untuk ini adalah SMK dengan kelompok industri dan pengolahan.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka daerah ini SMK yang paling cocok adalah SMK kelompok industri dan pengolahan, sedangkan SMK yang paling tidak sesuai adalah SMK kelompok pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, agar lulusan SMK dapat dimanfaatkan oleh daerah setempat, sebaiknya diganti dengan kelompok lain yang lebih sesuai.

### 8. Efisiensi Internal Pendidikan

Seperti halnya dua indikator pertama yaitu pemerataan dan peningkatan mutu, indikator untuk efisiensi juga menggunakan data kabupaten/kota atau propinsi sesuai dengan data yang tersedia. Untuk tingkat SD sampai tingkat SM menggunakan indikator yang sama. Indikator dimaksud meliputi jumlah keluaran, jumlah tahun -siswa, jumlah putus sekolah, jumlah mengulang, lama belajar, tahun-siswa terbuang, tahun masukan per input dan rasio keluaran dan masukan.

Tabel 2.15. Efisiensi Internal Pendidikan Tahun 2007/2008

No.	Komponen	SD+MI	SLTP + MTs	SMA + MA	SM + MA
1	Jumlah keluaran	984	991	977	966
2	Jumlah Tahun-siswa	6158	2996	2981	2958
3	Jumlah Putus sekolah	14	9	23	40
3	Jumlah Mengulang	205	5	12	8
5	Lama Belajar				
	- Lulusan	6.20	3.00	3.01	3.01
	- Putus Sekolah	3.39	1.99	1.68	1.76
	- Kohort	6.15	3.00	2.98	2.96
6	Tahun-siswa terabaikan				
	- Jumlah	518	28	62	90
	- Mengulang	470	9	24	19
	- Putus sekolah	48	18	38	71
7	Tahun-masukan per lulusan	6.26	3.02	3.05	3.08
8	Rasio keluaran/masukan	0.96	0.99	0.98	0.97

Sumber : Buku III Indikator

Berdasarkan Tabel 2.15 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 100 persen adalah pada tingkat SMP + MTs sebesar 991. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 6000 untuk tingkat SD dan 3000 untuk tingkat SLTP dan SM. Sedangkan yang memiliki nilai terbesar adalah pada tingkat SD + MI sebesar 6158. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen ada pada tingkat SMP + MTs sebesar 9. Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau terbaik ada pada tingkat SLTP+MTs sebesar 5.

Untuk melihat efisiensi suatu sekolah dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SD seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun dan tingkat SLTP dan SM seharusnya 3 tahun sehingga tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisiensi tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata yang kondisinya terbaik adalah pada tingkat SM + MA. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah pada tingkat SM + MA yaitu sebesar 40 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah.

Efisiensi atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun-siswa terbuang dirinci menjadi tiga yaitu terbuang karena mengulang, putus sekolah dan gabungan antara mengulang dan putus sekolah. Tahun-siswa terbuang yang terbaik yang berarti nilainya mendekati 0 ada pada tingkat SLTP + MTs. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka tingkat SLTP+ MTs memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada tingkat SLTP + MTs.

Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat SLTP + MTs memiliki kinerja yang terbaik dilihat

dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi.

Tabel 2.16. Siswa Bertahan dan putus sekolah Tahun 2007/2008

No.	Jenis sekolah	Putus sekolah	Bertahan Termasuk Mengulang	Bertahan Tanpa Mengulang
1	SD			
2	MI			
3	SD +MI	168	6365	4569
4	SLTP			
5	MTs			
6	SLTP+MTS	94	2896	2887
7	SMA			
8	MA			
9	SMA + MA			
10	SMK			
11	SM + MA	40	2744	2693

Dengan melihat jumlah siswa putus sekolah berdasarkan kohort dari 1000 siswa dapat diketahui bahwa dari tiga jenjang pendidikan yang ada, ternyata jenis sekolah SD +MI yang paling besar siswa putus sekolah, sedangkan jenis sekolah yaitu SM + MA yang paling kecil. Besarnya siswa yang putus sekolah ini juga terlihat dari siswa yang bertahan makin kecil dan yang terbaik terdapat di jenis sekolah SM + MA dan yang terburuk pada jenis sekolah SD + MI. Bila dikaitkan dengan siswa bertahan tetapi juga pernah mengulang, maka jenis sekolah SLTP + MTs mempunyai kondisi yang paling baik dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya dan yang paling jelek adalah SD + MI.

#### a. Tingkat SD (SD dan MI)

Berdasarkan Tabel 2.17 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 100 adalah SD. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 6000 untuk tingkat setingkat SD ternyata sebesar 6.182 untuk SD dan sebesar 6042 untuk MI. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen adalah MI sebesar 0.10. Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang lebih baik adalah MI sebesar 89.

Tabel 2.17. Efisiensi Internal Pendidikan SD dan MI Tahun 2007/2008

No	Komponen	SD	MI
1	Jumlah keluaran	981	990
2	Jumlah Tahun-siswa	6182	6042
3	Jumlah Putus sekolah	0,16	0,10
4	Jumlah mengulang	235	89
5	Lama Belajar		
	- Lulusan	6.23	6.09
	- Putus sekolah	3.48	3.29

No	Komponen	SD	MI
	- Kohort	6.17	6.06
6	Tahun-siswa terabaikan		
	- Jumlah	597	229
	- Mengulang	542	197
	- Putus sekolah	55	32
7	Tahun - masukan per lulusan	6.30	6.12
8	Rasio keluaran/masukan	0.95	0.98

Sumber: Buku III Indikator

Untuk melihat lebih efisien mana SD atau MI dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SD seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata kondisi MI lebih baik dibandingkan dengan SD yaitu 6.23 dan 6.09. Ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah SD yaitu sebesar 3.48 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah dan lebih tinggi SD jika dibandingkan dengan MI.

Mana yang lebih efisien SD atau MI juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun-siswa terbuang karena mengulang lebih baik di MI, sedangkan karena putus sekolah lebih baik di SD. Sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga SD. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka SD lebih baik jika dibandingkan dengan MI. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada SD.

Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa SD memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan MI.

#### b. Tingkat SLTP (SLTP dan MTs)

Berdasarkan Tabel 2.18 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah SLTP. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 3000 untuk tingkat SLTP ternyata hanya sebesar 2.999 untuk tingkat SLTP dan sebesar 2.987 untuk MTs. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen adalah SLTP sebesar 6. Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang lebih baik adalah SLTP sebesar 0.16.

Tabel 2.18. Efisiensi Internal Pendidikan SLTP dan MTs Tahun 2007/2008

No.	Komponen	SLTP	MTs
1	Jumlah keluaran	994	983
2	Jumlah Tahun-siswa	2.999	2.987
3	Jumlah Putus sekolah	6	17
4	Jumlah mengulang	0,16	0,25
5	Lama Belajar		
	- Lulusan	3.00	3.00
	- Putus sekolah	1.99	1.99
	- Kohort	3.00	2.99
6	Tahun-siswa terbangun		
	- Jumlah	21	44
	- Mengulang	9	9
	- Putus sekolah	12	35
7	Tahun - masukan per lulusan	3.02	3.04
8	Rasio keluaran/masukan	0.99	0.99

Sumber: Buku III Indikator

Untuk melihat lebih efisien mana SLTP atau MTs dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SLTP seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 3 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Bila dilihat lama belajar putus sekolah yang terburuk adalah MTs yaitu sebesar SLTP yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah dan lebih tinggi SLTP jika dibandingkan dengan MTs.

Mana yang lebih efisien SLTP atau MTs juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbangun. Tahun-siswa terbangun karena mengulang lebih baik SLTP, sedangkan karena putus sekolah lebih baik MTs. Sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga pada MTs. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka MTs lebih baik jika dibandingkan dengan SLTP. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada MTs.

Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa MTs memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal sekolah pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan SLTP.

#### c. Tingkat SM (SMA, SMK dan MA)

Berdasarkan Tabel 2.19 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati 1000 adalah SMA + MA. Jumlah siswa yang seharusnya 2958 untuk tingkat SM + MA ternyata hanya sebesar 2981 untuk SMA + MA dan sebesar 2972 untuk SM + MA.

Tabel 2.19. Efisiensi Internal Pendidikan SMA, SMK dan MA Tahun 2007/2008

No	Komponen	SMA	MA	SMK
1	Jumlah keluaran	979	972	960
2	Jumlah Tahun-siswa	2983	2975	2958
3	Jumlah Putus sekolah	21	28	40
4	Jumlah mengulang	12	11	8
5	Lama Belajar			
	- Lulusan	3.01	3.01	3.01
	- Putus sekolah	1.65	1.74	1.76
	- Kohort	2.98	2.98	2.96
6	Tahun-siswa terbuang			
	- Jumlah	58	73	90
	- Mengulang	23	24	19
	- Putus sekolah	35	49	71
7	Tahun - masukan per lulusan	3.05	3.06	3.08
8	Rasio keluaran/masukan	0.98	0.98	0.97

Sumber : Buku III Indikator

Dari ketiga jenis sekolah di tingkat SM dapat diketahui mana dari ketiganya yang lebih efisien adalah dengan menentukan indikator rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SM seharusnya lama belajar sampai dengan lulus atau disebut Rata-rata lama belajar lulusan adalah 3 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata kondisi MA terbaik adalah jika dibandingkan dengan dua sekolah lainnya yaitu SMA dan SMK. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah SMA yaitu sebesar 0.93 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah dan lebih tinggi SMA jika dibandingkan dengan SMK dan MA.

Efisien mana antara ketiga jenis sekolah tersebut juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang. Tahun-siswa terbuang karena mengulang lebih baik MA, sedangkan karena putus sekolah lebih baik MA. Sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga MA. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka MA merupakan terbaik jika dibandingkan dengan SMA dan SMK. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada MA.

Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa MA memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya.

#### D. Perspektif Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah

Perspektif pembangunan pendidikan dalam jangka menengah bagaimanapun juga akan dipengaruhi oleh capaian pembangunan pendidikan sebelumnya, arah perkembangan pembangunan pendidikan nasional, arah pembangunan provinsi Jawa Timur dan *trend* pendidikan global. Sejak awal abad ke XXI ini pendidikan holistik (*holistic education*) telah menjadi *trend* global, yang pada hakikatnya menitikberatkan perlunya pendidikan sejak dini sampai sepanjang hayat (*lifelong education*). Usia peserta didik bukan lagi dimulai dari angka 6 atau 7 tahun, tetapi bahkan telah dimulai sejak usia di bawah satu tahun.

Pendidikan holistik juga memiliki titik singgung dengan konsep kecerdasan ganda (*multiple intelligence*), sehingga pada Konferensi Pendidikan Holistik yang Kedelapan (*The 8<sup>th</sup> International Holistic Education Conference*) di Guadalajara, Mexico, November 2000 Ramon Gallegos Nava membuat model pendidikan holistik yang memadukan aspek kognitif, sosial, estetika, spiritual, korporal (fisik), dan emosional. Secara ringkas pendidikan holistik berusaha memadukan dan menyeimbangkan pentingnya pemikiran, pembelajaran dan ekspresi peserta didik sebagai manusia utuh, dan tergambar sebagai berikut:

Tabel 2.20. Dimensi, Literasi dan Kecerdasan dalam Pendidikan Holistik

Dimensi	Literasi	Kecerdasan
<i>Kognitif</i> : Proses pemikiran, kapasitas untuk berpikir secara logis	Linguistik, Kuantitatif	Verbal/Linguistik Logis/Matematis
<i>Sosial</i> : Seluruh pembelajaran yang berlangsung dalam konteks sosial dan berbagi makna	Sosial	Interpersonal
<i>Emosional</i> : Seluruh pembelajarandiikuti oleh keadaan emosi yang berpengaruh besar terhadap dampak pembelajaran	Emosional	Emosional
<i>Korporal atau Fisikal</i> : Seluruh pembelajaran berlangsung dalam suatu tubuh fisik. Harmoni tubuh-pikiran adalah unsure penting bagi kualitas belajar		Tubuh/Kinestetik Naturalistik
<i>Estetika</i> : Keindahan adalah aspek kunci bagi eksistensi manusia. Ekspresi estetis dari kehidupan yang lebih dalam adalah kunci bagi hidup bahagia	Seni	Visual/Spasial Musikal/Ritmik
<i>Spiritual</i> : Pengalaman langsung dan total dari cinta universal yang menyatakan rasa saling peduli, saling asih, persaudaraan dan perdamaian bagi seluruh makhluk hidup	Spiritual	Spiritual

Sumber : <http://www.hent.org/world/rgn/integration.htm>

Kondisi semacam di atas perlu diacu karena sementara ini justru perhatian terhadap PAUD baik secara nasional maupun di regional Jawa Timur masih dirasakan kurang. Kecuali itu secara umum perhatian pendidikan kita lebih bertumpu kepada aspek kognitif, sementara itu aspek sosial, estetika (keindahan) spiritual (bukan sekadar pembelajaran kognitif agama), fisik dan emosional masih belum banyak dikembangkan secara proporsional.

Di samping sejumlah data di atas kondisi objektif ciri wilayah baik dari segi alam, sosial, budaya dan perkembangan pengelolaan pendidikan di provinsi Jawa Timur dapat dipergunakan sebagai modal dasar atau sumber daya yang potensial bagi rencana pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Modal dasar yang dapat dipergunakan adalah menganalisis kekuatan (*strength*) itu antara lain adalah:

1. Telah dimilikinya Web Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ([www.pdkjatim.net.id](http://www.pdkjatim.net.id));
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mampu melaksanakan peningkatan layanan pendidikan berbasis ISO;
3. Provinsi Jawa Timur memiliki 19 museum dengan 14.283 koleksi benda museum, 1350 benda sejarah yang semua ini merupakan sumber belajar;
4. APK pendidikan dasar di atas 99% (SD+MI 113,73%, SMP+MTs 102,69%);
5. Tiap kabupaten/kota minimal telah memiliki sekolah standar nasional dan rintisan sekolah berstandar internasional. Provinsi Jawa Timur telah memiliki 125 SMP SSN dan 64 SMA SSN serta 3 SD RSBI, 55 SMP RSBI, 21 SMA RSBI dan 37 SMK RSBI;
6. Guru yang telah memiliki ijazah S2 sebanyak 8320 orang;
7. Perbandingan jumlah lembaga (SMA+MA) : SMK = 2281 : 1004 (69% : 31%), sedangkan perbandingan jumlah siswa (SMA+MA) : SMK = 689.045 : 526.450 (56,7%: 43,3%);
8. Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Kejar Paket A (PHB) 41.415 lembaga dengan 414.165 warga belajar, kejar paket A (setara SD) 388 lembaga dengan 6.763 warga belajar, Kejar Paket B 1.622 lembaga dengan 32.449 warga belajar, Kerja Paket C 1.418 lembaga dengan 28.369 warga belajar, Kejar Usaha 526 lembaga, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 331 lembaga, sedangkan jumlah kursus yang dimiliki 1.046 lembaga dengan jumlah warga belajar sebanyak 68.586 orang;
9. Kekayaan dan keragaman seni dan budaya, seperti Reog Ponorogo memiliki 137 organisasi, Ludruk: 113 organisasi, karawitan 493 organisasi, wayang kulit 38 organisasi, jaran Jawa: 288 organisasi.

Namun juga ada sejumlah gambaran capaian kuantitatif yang masih perlu dikembangkan dan merupakan kondisi yang menggambarkan kelemahan (*weakness*) yang harus diantisipasi dan dicarikan solusinya antara lain adalah:

1. TK (PAUD formal) belum berkembang dengan baik, sehingga masukan SD yang tidak berasal dari TK atau sederajat relatif masih tinggi yaitu di atas 70% ;
2. Masih rendahnya APK pendidikan menengah yaitu 67,53% dan masih tingginya angka putus 0,84% ;
3. Angka kelulusan belum mencapai 100% yaitu masih sekitar 96-98% (SD+MI 98,98%, SMP + MTs 97,54; SM + MA 96,82%);
4. Masih ada siswa yang putus sekolah SD+MI 0,22% dan SMP + MTs 0,29% ;
5. Masih tingginya rasio siswa/kelas yaitu untuk SMP 38 sedangkan SMA 44, hal ini tidak sesuai dengan standar nasional untuk SMP dan SMA yaitu 32;
6. Masih adanya ruang-ruang kelas yang mengalami rusak ringan hingga berat yaitu untuk SD 45,61%, SMP 17,02%, dan SMA 9,95%;

7. Masih ada 128.745 guru, terutamanya guru SD (sebanyak 112.981 orang atau 58%), sedangkan untuk guru SMP sebanyak 14.206 orang, guru SMA, MA dan SMK sebanyak 1.558 orang yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4, seperti persyaratan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selain itu persebaran tenaga pendidik tidak merata, dan umumnya terpusat di wilayah perkotaan;
8. Masih tingginya jumlah guru yang tidak layak dan semi layak mengajar disebabkan ketidak sesuaian antara bidang keahlian dengan mata pelajaran, di mana untuk pendidikan jenjang pendidikan setingkat SMP sebesar 15,86%, MTs 26,61% dan SMA sebesar 21,76, MA 40,57%, SMK 27,51%;
9. Masih tingginya angka buta huruf latin di wilayah provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 3.575.517 orang;

### E. Analisis Lingkungan Strategis Berlandaskan SWOT

Analisis terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal diperlukan guna mengetahui sasaran prioritas apa yang direncanakan di dalam menanggulangi masalah pendidikan dan mengembangkan mutu pendidikan di Jawa Timur. Untuk itu diperlukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) tentang kondisi pendidikan di Jawa Timur, yang sebenarnya tidak bisa lepas dari kondisi umum pendidikan di Indonesia.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian rencana strategis yang pada hakikatnya merupakan kekuatan (*Strength*) dalam analisis SWOT dapat diidentifikasi antara lain:

1. Pengakuan atas hak dasar untuk memperoleh pendidikan telah dijamin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
2. Adanya aspek legal yang menjamin pengelolaan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu dan memberdayakan seperti adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Komitmen pemerintah untuk merealisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 tentang kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendanaan pendidikan, merupakan peluang bagi daerah untuk secara lebih leluasa merencanakan dan mengelola pendidikan yang berorientasi mutu;
4. Sebagai tindak lanjut dari komitmen di atas maka setiap kabupaten/kota di Jawa Timur telah berupaya mengalokasikan sekitar 20% dari APBDnya untuk pendanaan pendidikan, bahkan ada kota yang mengalokasikan sekitar 30% dari APBDnya untuk dana pengembangan dan pembangunan pendidikan;
5. Adanya reformasi dan regulasi yang pro pembangunan pendidikan seperti ketentuan Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional Pendidikan bahkan acuan internasional dalam meningkatkan mutu pendidikan;
6. Budaya kerja tim dan pengelolaan institusi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang akuntabel dan responsif;
7. SDM di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sinergi membangun kinerja berkualitas;

8. Kebanggaan seluruh warga masyarakat dan rasa memiliki potensi Provinsi Jawa Timur, karena Provinsi Jawa Timur memiliki 19 museum dengan 14.283 koleksi benda museum, 1350 benda sejarah yang semua ini merupakan sumber belajar;
9. Tiap kabupaten/kota minimal telah memiliki sekolah standar nasional dan rintisan sekolah bertaraf internasional;
10. Koordinasi dan pemanfaatan terpadu sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan;
11. Kerja sama yang saling mendukung dengan instansi terkait lainnya baik (misalnya dengan dunia usaha, perguruan tinggi, LPMP, BPPLSP dan lain sebagainya);
12. Sarana dan prasarana yang memadai sesuai 8 standar BSNP untuk mendukung program aksi pendidikan;
13. Beberapa lembaga pendidikan telah menerapkan TIK secara intensif baik untuk kegiatan pembelajaran, manajemen sumberdaya pendidikan dan layanan pendidikan (misalnya pembelajaran menggunakan TI, PSB melalui internet *on line*, dll)
14. Kekayaan dan keragaman seni dan budaya merupakan dasar untuk membentuk dan membangun watak, karakter dan budi pekerti.

Dalam kaitan kelemahan (*weakness*) maka kelemahan yang harus diantisipasi dan dicarikan solusinya antara lain adalah:

1. Sebagai imbas kualitas pendidikan nasional yang mutunya masih di bawah pencapaian mutu sejumlah negara pendiri ASEAN, yakni Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina maka masih diperlukan upaya yang besar demi meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Timur;
2. Masih rendahnya tingkat partisipasi PAUD baik formal dan non formal, sekolah menengah dan pendidikan tinggi, serta disparitas yang mencolok antara penduduk miskin dan yang berkecukupan, wilayah pulau Jawa dibandingkan pulau Madura, wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan, wilayah yang mudah terjangkau dibandingkan wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau;
3. Lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu melahirkan lulusan yang bermutu dan berketerampilan dengan kompetensi keahlian yang cukup bagi menghadapi kehidupan yang penuh tantangan;
4. Belum optimalnya pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam peningkatan kualitas lembaga
5. Banyak sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan sekolah swasta tertentu yang belum memenuhi fasilitas pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan dan lain-lain, guna memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan;
6. Kurangnya aksesabilitas buku pelajaran terutama di wilayah pedesaan;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sekolah yaitu sebagai media pembelajaran, sumber belajar, dan *e-learning*, dengan disparitas yang amat mencolok antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan;
8. Layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sementara itu, program wajib belajar paket C masih terbatas sekali aksesnya;
9. Belum optimalnya upaya peningkatan dan pengembangan seni budaya di sekolah dan pemanfaatan museum dan peninggalan lainnya sebagai sumber belajar.

Sedangkan dari aspek peluang (*opportunity*) dijumpai hal-hal sebagai berikut;

1. Sistem perdagangan dunia yang terbuka memberikan peluang dalam meningkatkan mutu pendidikan pada seluruh tataran pendidikan;
2. Semakin terbukanya sistem pendidikan saat ini, sehingga layanan pendidikan yang bermutu sangat penting peranannya;
3. Pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*education for the knowledge based economy*);
4. Pembangunan pendidikan saat ini semakin disadari merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia disadari amat ditentukan oleh kualitas dan akses pendidikan, sehingga upaya untuk melaksanakan pemberantasan buta aksara dan angka partisipasi sekolah disadari merupakan upaya pokok dalam mencapai IPM yang tinggi;
6. Laju perkembangan IPTEKS dunia semakin cepat, untuk mengejar ketertinggalan dalam penguasaan IPTEKS hanya perbaikan mutu pendidikan yang terus menerus berkesinambungan dan pengembangan budaya riset di seluruh jenjang sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi merupakan jawabannya;
7. Peluang yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan saat ini cukup prospektif. Dengan adanya Direktorat Tenaga Kependidikan, kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan akan dapat difasilitasi dengan baik, sesuai dengan empat kompetensi wajib yang harus dimiliki guru. Semakin luasnya akses informasi melalui teknologi komunikasi dan informasi (TIK, *Web* dan sejenisnya) membuka peluang bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar terus menerus meningkatkan kemampuan diri;
8. Keragaman seni dan budaya yang dikembangkan melalui pendidikan seni dan budaya merupakan peluang untuk meningkatkan dan diversifikasi sumber devisa bagi negara.

Dalam pada itu berbagai tantangan atau ancaman (*threat*) yang diperkirakan akan dihadapi antara lain adalah;

1. Adanya komitmen global yang mengikat untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, dalam kerangka aksi Dakkar mengenai Pendidikan untuk Semua (Pendidikan Untuk Semua (PUS), *Education for All*);
2. Penerapan pengarusutamaan gender (PUG, *gender mainstream*) di Jawa Timur menghadapi kendala karena pada sebagian masyarakat masih menganggap tidak ada perlunya bagi perempuan bersekolah tinggi-tinggi;
3. Masih adanya keengganan sejumlah satuan pendidikan yang dikelola Yayasan untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, karena dianggap mencampuri urusan Yayasan dalam mengelola pendidikan. Sementara itu bahkan di sejumlah sekolah negeri terutama di wilayah pedesaan masih dijumpai kegagalan dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
4. Masih adanya sejumlah satuan pendidikan yang belum menerapkan KTSP secara utuh dan konsekuen seperti yang diamatkan dalam KTSP;
5. Tantangan yang dihadapi pendidik dan tenaga kependidikan dalam waktu dekat ini adalah merespon kesungguhan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidik dan

tenaga kependidikan. Menampilkan kinerja optimal untuk bersaing dengan pendidik dan tenaga kependidikan dari Negara lain yang saat ini sudah boleh bekerja di negeri ini sebagai konsekuensi dari era WTO;

6. Tantangan jangka pendek yang dihadapi adalah segera menyiapkan diri, mengubah pola pikir untuk sanggup berkompetisi secara terbuka, selalu mencari informasi baru dan memperbaharui diri, baik pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Pada jangka menengah pendidik dan tenaga kependidikan harus mampu menjadi manusia pembelajar yang selalu meningkatkan dirinya sesuai dengan tantangan perubahan. Pada jangka panjang tantangan pendidik dan tenaga kependidikan adalah kemampuan menampilkan citra diri sebagai individu yang sadar terhadap produktivitas kerja, prestasi kerja, dan perilaku yang adaptif dalam pengembangan diri untuk menyesuaikan kemampuannya sesuai tuntutan profesionalnya.